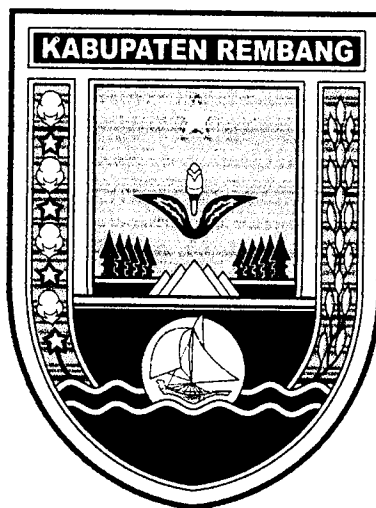


RISALAH

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2017



TENTANG

**MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT
KE- 72 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 DAN
PENGANTAR/ KETERANGAN ATAS RUU APBN TAHUN 2018
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE- 72
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 DAN
PENGANTAR / KETERANGAN ATAS RAPBN TAHUN 2018
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

Hari : RABU
Tanggal : 16 AGUSTUS 2017
Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
 2. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Peringatan HUT ke- 72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017;
 3. Skors;
 4. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Penyampaian Pengantar/ Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun 2018 beserta Nota Keuangan...

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. GUNASIH, S.E.
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
2. Fraksi Demokrat	: 4 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 29 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 16 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa , atas anugerah yang diberikan kepada kita berupa kesehatan jasmani dan rokhani sehingga pada

Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017 dan Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangan dan Dukumen Pendukungnya. Penyelenggaraan rapat paripurna ini mengacu pada Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-755/M.Sesneg/Set/TU.00.04/08/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Pedoman Peringatan HUT Ke-72 Kemerdekaan RI Tahun 2017, dan atas dasar penjadwalan oleh Badan Musyawarah bersama Panitia Tetap Peringatan HUT Kemerdekaan RI Kabupaten Rembang pada tanggal 14 Agustus 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Pada hari Kamis tepatnya tanggal 17 Agustus 2017 esok pagi, bangsa Indonesia memperingati Indonesia merdeka yang ke-72. Hari yang bersejarah tak pernah dilupakan, selalu dikenang, selalu diperingati, karena mulai tanggal dan bulan tersebut Indonesia lahir, Indonesia bebas dari cengkeraman penjajah yang menindas, menjajah dan merampas hak azasi bangsa Indonesia waktu itu. Kemerdekaan Indonesia bukanlah semata-mata pemberian dari bangsa lain, namun kemerdekaan Indonesia adalah anugerah dari Allah SWT disertai perjuangan para pejuang bangsa yang dengan mati-matian, tak kenal lelah, tak pantang mundur, tak putus asa dalam mengusir penjajah. Sebagai bangsa Indonesia kita hendaknya mengetahui liku-liku perjuangan para pejuang bangsa dalam merebut tanah air Indonesia dan selalu menghargai jasa-jasa beliau yang banyak gugur di

Indonesia Tahun 2017 ini, dengan meneladani dan mengambil nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan para pejuang dan pendiri bangsa, saya mengajak semua yang ada disini dan seluruh masyarakat Kabupaten Rembang, marilah senantiasa kita bersatu padu bekerja bersama-sama dalam membangun Kabupaten Rembang menjadi Kabupaten Rembang yang lebih baik, Rembang yang Makmur, Aman, Damai, Nyaman dan Indah, sebagaimana slogan Kabupaten Rembang yakni Rembang Madani.

Dan pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan selamat Hari Pramuka yang diperingati pada tanggal 14 Agustus 2017 kemarin, semoga Pramuka semakin eksis dalam membentuk dan membangun tunas-tunas muda yang memiliki watak, kepribadian, karakter, dan jati diri yang kokoh. Pramuka merupakan garda terdepan pelaku perubahan dalam pembentukan karakter kaum muda.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 29 orang

Adapun pada pasal 67 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan bahwa “ Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan”. Dengan demikian Rapat Paripurna ini dapat kita mulai tanpa memperhitungkan jumlah anggota Dewan yang hadir.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum kita memasuki acara pokok, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017;
3. Skorsing
4. Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya;
5. Penutup.

Selanjutnya kita masuki acara kedua yang merupakan agenda pokok yang pertama hari ini, yaitu ***"Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017"***.

Untuk keperluan tersebut maka rapat paripurna saya skors.

(Ketuk palu 1 kali)

Kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, anggota Forkompinda serta rekan-rekan Pimpinan DPRD dipersilahkan menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan.

➤ ***(Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017 terlampir)***

Skorsing saya cabut, Rapat Paripurna Istimewa kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Demikian telah kita ikuti bersama Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017. Sehubungan Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB, maka rapat kami skors sampai pukul 12.45 WIB.

(Ketuk palu 1 kali)

Sehubungan waktu skors telah habis maka skors saya cabut, dan rapat paripurna istimewa saya lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita ikuti acara pokok yang kedua yaitu ” ***Mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya***

Untuk keperluan tersebut maka rapat paripurna saya skors.

(Ketuk palu 1 kali)

Kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, Anggota Forkompinda dan rekan-rekan Pimpinan DPRD dipersilahkan menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan.

**=====PENYAMPAIAN PENGANTAR/ KETERANGAN
PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN
2018 BESERTA NOTA KEUANGAN DAN DOKUMEN
PENDUKUNGNYA=====**

➤ *(Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya terlampir).*

Skorsing saya cabut, Rapat Paripurna Istimewa kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Demikian baru saja kita dengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya. Dengan telah disampaikannya Pengantar

Namun sebelum saya akhiri, untuk mengenang, menumbuhkan kebanggaan dan semangat kecintaan kita kepada para pendahulu kita, marilah kita kumandangkan pekik kemerdekaan sebagai motivasi dan penggugah semangat juang kita : .."MERDEKA" !! (berteriak sambil mengepalkan tangan).

Akhirnya dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil'alamin*" tepat pukul 15.25 WIB Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

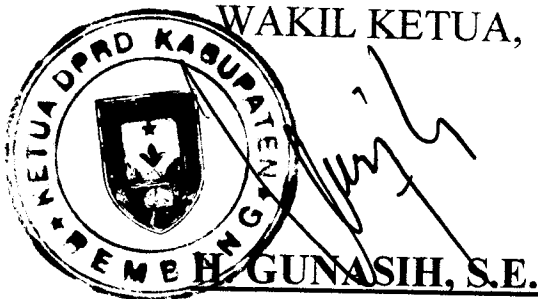
(Ketuk palu 3 kali)

Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

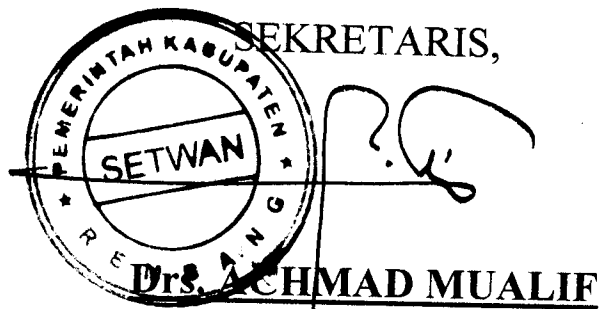
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,



H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,



Drs. Achmad Mualif

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN DALAM RANGKA PERINGATAN HUT
KE- 72 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 DAN PENGANTAR / KETERANGAN
ATAS RAPBN TAHUN 2018 BESERTA NOTA
KEUANGANNYA**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka
Peringatan HUT ke - 72 Kemerdekaan Republik
Indonesia Tahun 2017;
- LAMPIRAN III : Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka
Penyampain/ Keterangan atas RAPBN Tahun
2018 beserta Nota Keuangannya.

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

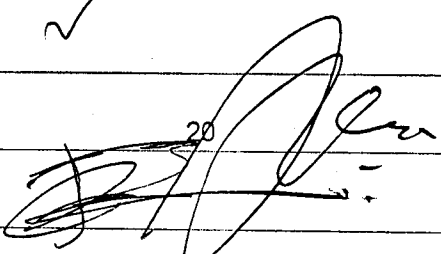
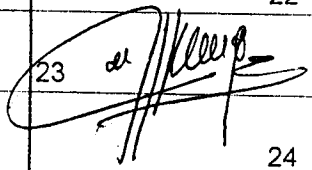
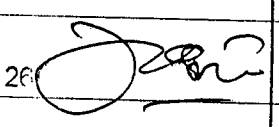
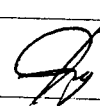
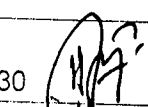
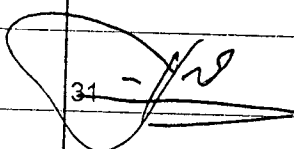
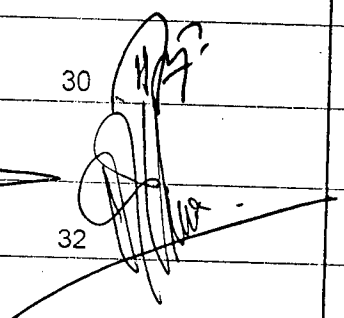
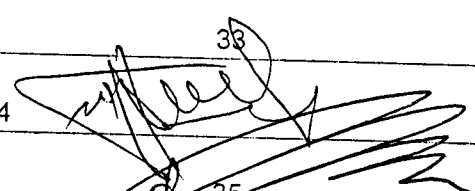
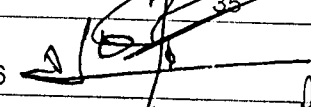
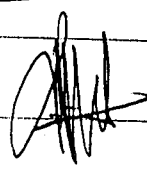
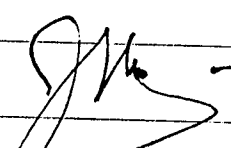
ACARA : 1. MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA
HUT KE-72 KEMERDEKAAN RI TH. 2017

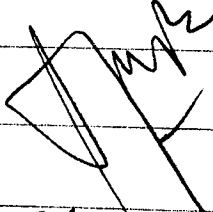
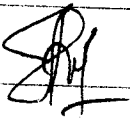
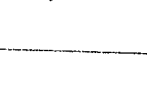
2. MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA PENYAMPAIAN/
KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG APBN TA. 2018 BESERTA
NOTA KEUANGAN.

HARI/TANGGAL : RABU, 16 AGUSTUS 2017

PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	

NO 1	N A M A 2	JABATAN 3	TANDA TANGAN 4	KET 5
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19 ✓	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20 	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23 	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 ✓	
26	JASMANI	Anggota	26 	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28 	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30 	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32 	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36 	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 	

	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
	2	3	4	5
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43 	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44 	
45	NUR JANNAH	Anggota	45 	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

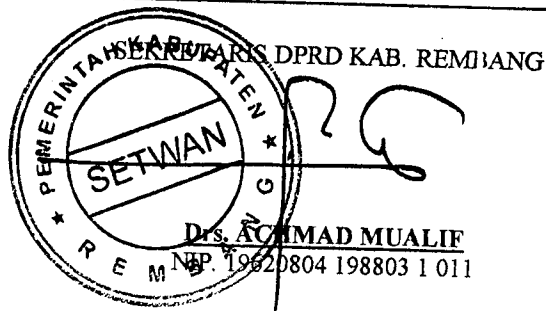
ACARA : 1. MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KE-72 KEMERDEKAAN RI TH. 2017

2. MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA PENYAMPAIAN/ KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG APBN TA. 2018 BESERTA NOTA KEUANGAN.

HARI/TANGGAL : RABU, 16 AGUSTUS 2017

PUKUL : 09.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I	Bupati Rembang	1.
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	PRABOWO AJI SH MH	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Deukraman, SH MH	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	DARMAWAN S	Dandim 0720 Rembang/.....	5.
6	PANGKY BHUANA	Ka. Kepolisian Resort Rembang/.....	6.
7	Mahzumi	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.



DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

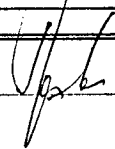
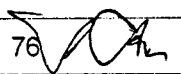
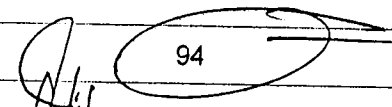
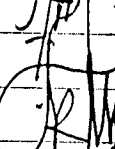
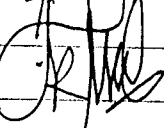
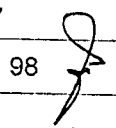
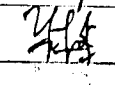
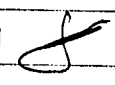
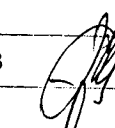
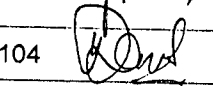
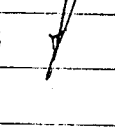
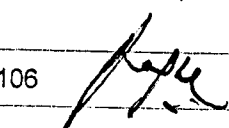
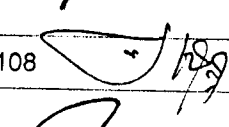
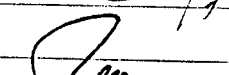
- ACARA : 1. MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KE-72 KEMERDEKAAN RI TH. 2017
2. MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA PENYAMPAIAN/ KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG APBN TA. 2018 BESERTA NOTA KEUANGAN.

HARI/TANGGAL : RABU, 16 AGUSTUS 2017

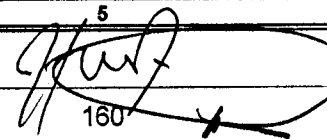
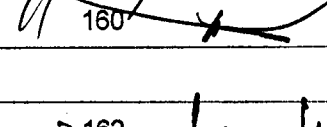
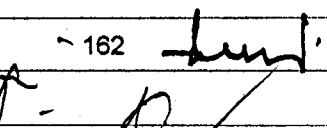
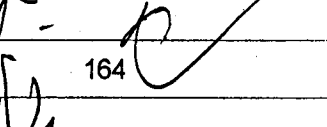
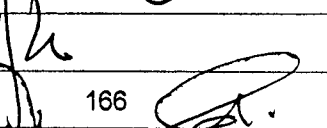
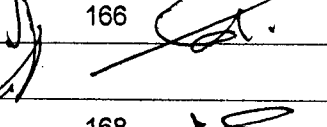
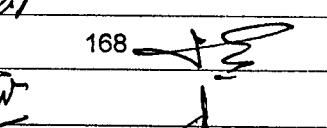
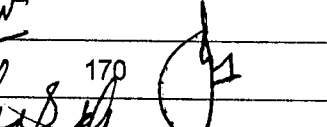
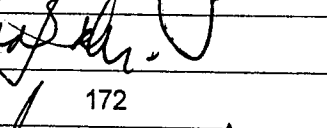
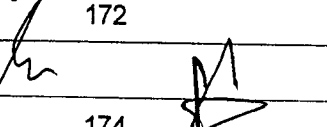
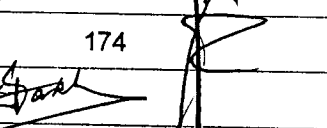
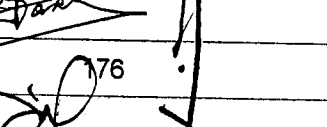
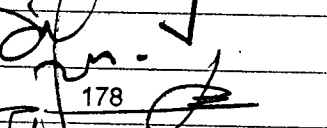
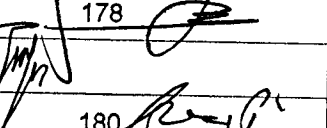
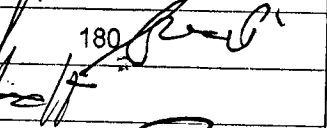
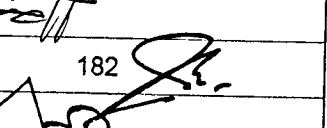
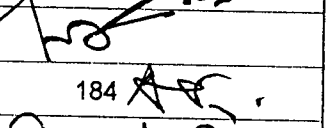
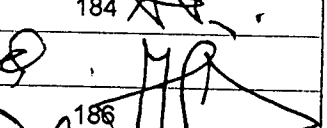
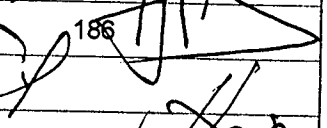
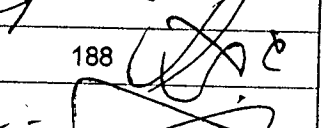
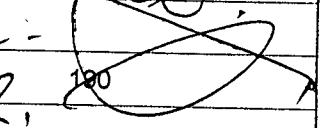
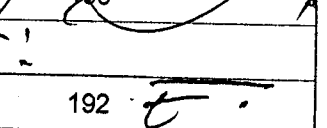
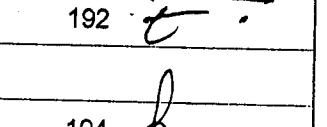
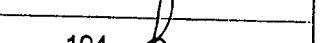
PUKUL : 09.00 WIB

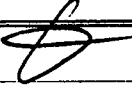
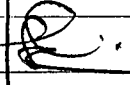
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Noor Effendi	SAB	1
2	STAF AHLI BUPATI	Narsono	SAB	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA	A. Fawani	AS. II	6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	A. H. M. D. D. D.	TAPEM	8
9	BAG. HUKUM	Edy Djoko P.	Hukum	9
10	BAG. HUMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gautama	Adm Pemb	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Egy Hanley	ke	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Lahipudin	Peror	13
14	BAG. UMUM			14
15	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN			15
16	BPPKAD	Musbin	Kabon	16
17	INSPEKTORAT	FAHRUDIN	INSPEKTUR	17
18	BAPPEDA			18
19	DINPERMADES	H. WALLUJO		19
20	B K D	SRI TERHA W.		20
21	DINAS PMPTSP dan TENAGA KERJA	Sri Sugiyarti	Plt. Kabu.	21
22	B P B D	BUTARIS	Kabon	22
23	DPU TATA RUANG	PEUGOKO	Kadus	23
24	DINPERKIM	Suryo	Ka Dun	24
25	DINAS KESEHATAN	Ali Syofri	Ke Din	25
26	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			26
27	DINAS INDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANPAN			

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Purnomo	ka	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	ka	36
37	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	Esi W	ka	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Setyoh	ka	38
39	SATPOL PP			39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR	M. Suni Mangro Dikus		43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG	Agus Setyoh Buri W. Pin Cab.		44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	ATHO'ILLAH	ka	49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG	AMIRUDIN	KEPALA BPS	51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH) Saman	A. Wahid	Kemang. TV.	62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG	Suli Suli	Secretaris	65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG	Toto K Haru S		67
68	PERUM PEGADAIAN			68

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
75	DPC PARTAI DEMOKRAT	SOENARNO	Seu R	75 
76	DPD PARTAI GOLKAR	KASNADI	Wk Pkng 1	76 
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM			86
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90
91	MIMBAR RAKYAT			91
92	CARAKA CANDI			92
93	KEDAULATAN RAKYAT			93
94	SMP N 6 REMBANG	Budi Supjanto	Kasak	94 
95	SMP N 1 REMBANG	Suyitno	Humas	95 
96	FKUB	RAMELAN	Anggota	96 
97	LMP	SA Harp	Karyawati	97 
98	KSP BHITA RAHARJA	EDY WIYANA	PENGURUS	98 
99	SMA Kartini Rembang	Yeni A	Guru	99 
100	Retho Wni Purwani	REN	Kabid yang jang	100 
101	Dinas DPKB	KGAT INI	sement.	101 
102	Dinas PPKB	PRİYADI	Kabid Diklat KB	102 
103	Kep. SMA 2 Rbg	Sumarno	Kep. Sek	103 
104	Gereja Bethel Indonesia Rbg	Pdm. David K. Sth.	Staff	104 
105	Andreas IDY DLH	Andreas IDY	Kalimat	105 
106	SLH	Pratowo	+	106 
107	BPPS Kasehatar	Janet Widi	Ko Ops Kab.	107 
108	SMP N 3 REMBANG	SRI Purwaningsih	Kurikulum 1	108 
109	Sulastri/SMA 3 Rbg	Sulastri	Guru	109 
110	RKD	Bambang P	kebid	

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
117	SMK 1 Rembang	M. Wulpani	K S.	117
118	SMK ROS SUDARSO RSG	HERRU. S	Ks.	118
119	DINLUKAN	PAMUDJI	Kabid Kemasyarak	119
120	Dinduk Copil	Prasetyo	Kabid	120
121	SMK N 5 Rembang	Sri Harini	Kepsek	121
122	Sek Dm Bud Pm d	Suryaman	Sek.	122
123	Din LH	Maryosa	sekretaris	123
124	Dinbupar	Winaryu K	Kabid Pemasaran	124
125	Sangjano.	Sangjano	Kabid.	125
126	Mrs Kyo	Wong	Kabid	126
127	Mardani Dinlutkan	Mardani	Kabid.	127
128	INDAGROKUM	KENAN SUPRAY	Kabid	128
129	P.R. AM SETIAH (DPU)		Kabid TAPU	129
130	DPMPTSP NAKER	REHARD	KABID NAKER	130
131	DINPERMADEI	SRI SUKYANDANI	KABID LKA	131
132	Dindikpora	Ratih Kusuma	Kabid. Pemb. PAUD	132
133	MUNI M L	DPMPTSP NAKER		133
134	MARSONO.			134
135	RATIHUTANITO	D. N. TILIK	Kabid PK	135
136	M. SOFYATI		Kabid TIC	136
137	M. Arief. K	SENKOM	Cetuh	137
138	Nyoto TS.	SENKOM	Sekre	138
139	REHCEMALAN DLH	SA'RONI	KABID	139
140	SMK Negeri 1 Rbz	Lazunijan	Ka. TU	140
141	y. SUSILO KADI	DINLUKAN	KABID	141
142	DINTAMPAN.	WIDODO	KABID.	142
143	Satpuk PP	WIYOTO	KABID.	143
144	KODIM	KUNDARI	Pasi pers	144
145	KOMINFO	SURANTO	Kabid	145
146	KOMINFO	NURPURNAN	KABID	146
147	GENRO Wiyono	DPUTARY	KABID.	147
148	ABU MASAI	MAN Rembang	WAKAMAD	148
149	Hadi Sutopo.			149
150	INDAROP.	Hadi Sutopo.	Kabid Rep	150
151	STIE 'YPP'	Masbohen	putak 3	151
152	STIE 'YPP'	Wiyoto	Kabid	152

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
159	Andika Pura	Suharto	Kabid Pura	159 
160	Dinas PKK	Bni Murtu	Kabid Anggar	160 
161	Dinlutkan	BUDIYONO	sekretaris	161 
162	DINKES.	ARIS.S.	Kabid P2	162 
163	Dinkes	Supriyoluh	sekret	163 
164	Prarambaya S	Pranandya	wakil polas	164 
165	Anduhcapi	Djoko V	Eksekutis	165 
166	HERI SUDIBYO	SUDLO	GVN	166 
167	PANAS GAY MANGGALAN	PKUN		167 
168	SMK Bina Mandiri	Susilo	Kep. Sek	168 
169	JES DPKP	Restiannan		169 
170	Muskesmas Dinkes	murnings	Petahid Yang	170 
171	Nurhidnyah	Duntan	sekret	171 
172	Smart Dinkes			172 
173	RSI Arapah	Isman Hana	Ka. Lina	173 
174	RSI Arapah	Arif	Sele	174 
175	Perhimpun	Sutero	Sekda	175 
176	BU TARU	Triyanto Ind	sekt	176 
177	APKIO. W	Kabid. Pribu		177 
178	KARSONO.	Am Arpus	Kabid Perpus.	178 
179	Sutar tik	Dipdukcapi/	Kabid Yan Capi/	179 
180	A. Badi Amara	Kabid R R DPKP	Budi Lema	180 
181	Sri Prabandari	Dintanpan		181 
182	Dinbudpan	Chais Prasetyana	Kabid Destinasi	182 
183	Dintanpan	Agus H	Kabid Pelinae	183
184	AFAN M	Kati D Asat BPPK	BPPK	184
185	BARHANU	Kodir 5201	PKETER	185
186	M. Amf	Kec. Iragu	Sekca	186
187	Inspemak	Titiek W.	Tuban Wil II	187
188	- "	Sri W.	- " - II	188
189	DINPERMANAS.	Wuryana	SEKT.	189
190	- "	ARIF DS	Kabid KKKP.	190
191	SUTEHARTO	BAPPEDA	KABID IPW	191
192	DPKP	EDIR	SERBIN	192
193	BRI Pambang	Retno.	Funding	193
194	BRI Pambang	Heni		194

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
201	Danganda, SH	Sat UK	Staff	201 
202	Selersa		Par Ramo/Hes	202 
203				203
204				204
205				205
206				206
207				207
208				208
209				209
210				210
211				211
212				212
213				213
214				214
215				215
216				216
217				217
218				218
219				219
220				220
221				221
222				222
223				223
224				224
225				225
226				226
227				227
228				228
229				229
230				230
231				231
232				232
233				233
234				234
235				235
236				

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
243	Agus Bodin	Agus	Inf	243
244	40 MAK	Agus		244
245	PGRI	Jumanto	Kelua	245
246	Pasiaps Bodin	Rusdi	Pasiaps	246
247				247
248				248
249				249
250				250
251				251
252				252
253				253
254				254
255				255
256				256
257				257
258				258
259				259
260				260
261				261
262				262
263				263
264				264
265				265
266				266
267				267
268				268
269				269
270				270
271				271
272				272
273				273
274				274
275				275
276				276
277				277
278				278

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
285				285
286				286
287				287
288				288
289				289
290				290
291				291
292				292
293				293
294				294
295				295
296				296
297				297
298				298
299				299
300				300
301				301
302				302
303				303
304				304
305				305
306				306
307				307
308				308
309				309
310				310
311				311
312				312
313				313
314				314
315				315
316				316
317				317
318				318
319				319
320				

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

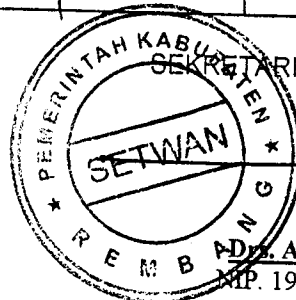
**ACARA : 1. MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KE-72
KEMERDEKAAN RI TH. 2017**

**2. MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA PENYAMPAIAN/
KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG APBN TA. 2018 BESERTA
NOTA KEUANGAN.**

HARI/TANGGAL : RABU, 16 AGUSTUS 2017

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agas R. Alim	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOCH	2
3	CAMAT SUMBER (PLT J.)		3
4	CAMAT SULANG	Slamet R. H.	4
5	CAMAT BULU	Taswadi	5
6	CAMAT PAMOTAN	W. W. Yoh.	6
7	CAMAT GUNEM	TEGUT.	7
8	CAMAT SALE	Kurnadi	8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	Indhant	10
11	CAMAT SEDAN	SUBHAN	11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN	Mashadi	13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kurnadi	14



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

ACHMAD MUALIF
NP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR

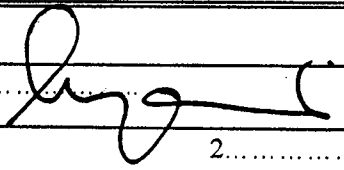
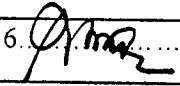
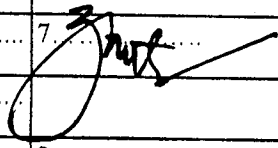
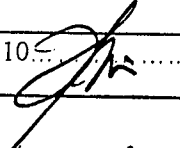
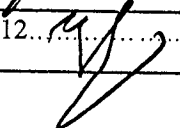
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

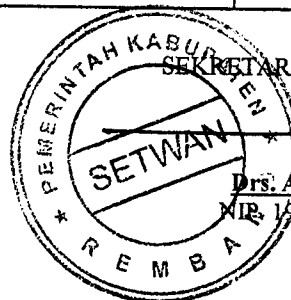
ACARA : 1. MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KE-72 KEMERDEKAAN RI TH. 2017

2. MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA PENYAMPAIAN/
KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG APBN TA. 2018 BESERTA
NOTA KEUANGAN.

HARI/TANGGAL : RABU, 16 AGUSTUS 2017

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	Kapolsek Rembang	Haryanto, SH	1. 
2	Kapolsek Kaliari		2.
3	Kapolsek Sumber		3.
4	Kapolsek Sulang		4.
5	Kapolsek Bulu		5.
6	Kapolsek Pamotan	W. MIRON. R	6. 
7	Kapolsek Gunem	JAROT. F	7. 
8	Kapolsek Sale		8.
9	Kapolsek Lasem		9.
10	Kapolsek Pancur	Sri Giyanti, SH	10. 
11	Kapolsek Sedan		11.
12	Kapolsek Sluke	Sun armin	12. 
13	Kapolsek Kragan		13.
14	Kapolsek Sarang		14.



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

NIR. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

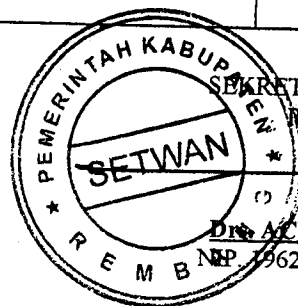
ACARA : 1. MENDENGARKAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI DALAM RANGKA HUT KE-72 KEMERDEKAAN RI TH. 2017.

2. MENDENGARKAN PIDATO PRESIDEN RI DALAM RANGKA PENYAMPAIAN/ KETERANGAN PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG APBN TA. 2018 BESERTA NOTA KEUANGAN.

HARI/TANGGAL : RABU, 16 AGUSTUS 2017

PUKUL : 09.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	Danramil Rembang		1.....
2	Danramil Kaliori	Wardiyana	2.....
3	Danramil Sumber		3.....
4	Danramil Sulang	Putrisno	4.....
5	Danramil Bulu		5.....
6	Danramil Pamotan	Danarun	6.....
7	Danramil Gunem		7.....
8	Danramil Sale	Gatot Suboto	8.....
9	Danramil Lasem		9.....
10	Danramil Pancur		10.....
11	Danramil Sedan		11.....
12	Danramil Sluke	Wanji	12.....
13	Danramil Kragan		13.....
14	Danramil Sarang		14.....



SEKRETARIS DPRD KAB.

REMBANG

Dr. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620304 198803 1 011

**PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PERINGATAN HUT RI KE – 72
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017**

RABU, 16 AGUSTUS 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga;

Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima;

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia Keenam;

Yang saya hormati Bapak Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia Kesebelas;

Yang saya hormati Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional;

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Marilah kita bersama-sama bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk memperingati 72 tahun Indonesia Merdeka. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Dalam berbagai kesempatan, saya selalu katakan, kita ini adalah bangsa yang besar. Sekali lagi, Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Besar, bukan hanya karena jumlah penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa. Besar, bukan hanya karena memiliki 17 ribuan pulau. Besar, bukan hanya karena sumber daya alam yang melimpah. Tapi, kebesaran Indonesia karena bangsa ini sudah teruji oleh sejarah, bisa tetap kokoh bersatu sampai menginjak usianya ke-72 tahun. Sementara di beberapa negara lain, dilanda konflik kekerasan antarsuku, perpecahan antaragama, pertikaian antargolongan, kita bersyukur kita tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Bahkan sekarang ini, kita menjadi rujukan banyak negara dalam hal mengelola kebhinnekaan dan membangun persatuan. Kita adalah bangsa petarung yang berani berjuang dengan kekuatan sendiri meraih kemerdekaan. Kita merebut kemerdekaan berkat perjuangan para pahlawan kita, ulama kita, para santri, pemimpin agama-agama kita, dan pejuang dari seluruh pelosok Nusantara. Semua itu harus membuat kita semakin bangga pada Indonesia, negeri yang kita cintai bersama. Semua itu, harus membuat kita percaya diri untuk menghadapi masa depan. Kita harus meninggalkan warisan kolonialisme, yang menjadikan bangsa kita bermental budak, karakter rendah diri, pecundang dan selalu pesimis dalam melihat hari esok.

Kita harus membuang jauh-jauh mentalitas negatif yang membuat sesama anak bangsa saling mencela, saling mengejek dan saling memfitnah. Karena kita adalah bersaudara, saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air. Kita harus membangun fondasi kultural yang kuat. Kita harus bersatu dan berdiri gagah untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, yang semakin ekstrem, dan berubah dengan sangat cepat. Hanya bangsa yang cepatlah yang akan memenangi persaingan global.

Kita harus ingat bahwa kita pernah menjadi tempat bagi negara lain untuk belajar, belajar tentang Islam, belajar tentang seni budaya, belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain. Kebanggaan inilah yang harus kita rebut kembali, kebanggaan terhadap kreasi dan karya sendiri, kebanggaan terhadap produk sendiri.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Sebagai bangsa yang besar dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, mempunyai ratusan suku dan ribuan pulau, bangsa Indonesia harus percaya diri untuk meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kejayaan. Kita harus percaya pada kekuatan bangsa kita sendiri. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa kita mampu untuk meraih kemajuan. Dulu kita takut terhadap masuknya bank-bank asing ke negeri kita. Ternyata bank-bank nasional kita mampu bersaing dan kini telah menjadi bank-bank yang besar, dan modern. Kita memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa yakni anak-anak muda. Anak-anak muda kita banyak yang menjadi juara olimpiade matematika, fisika, dan biologi. Anak-anak muda kita telah menunjukkan prestasi mereka, mulai dari menjadi juara hafidz Al-Quran, berprestasi dalam karya robotik, sangat inovatif sebagai start-up, dan juga kreatif dalam berkesenian sampai di panggung-panggung dunia. Demikian pula dengan industri kreatif dan film-film nasional kita, yang banyak digerakkan oleh anak-anak muda, semakin digemari dan ditonton oleh banyak orang. Tapi semua keunggulan itu tidak harus membuat kita terlena, membuat kita berpuas diri. Masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Masih banyak janji

kemerdekaan yang harus kita tunaikan. Sebagai refleksi bersama, kita harus jujur mengakui bahwa tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kalau rumah-rumah rakyat kita di seluruh pelosok nusantara tidak menikmati aliran listrik. Tidak mungkin kita menjadinegara yang kompetitif ketika biaya logistik kita mahal. Tidak mungkin kita menjadi Poros Maritim Dunia, kalau kita tidak mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan, kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita di seluruh penjuru Tanah Air, sangat terbatas.

Kita juga menghadapi tantangan untuk terbebas dari jebakan sumber daya alam. Setelah selesainya booming migas di tahun 1970an, selesainya booming kayu di tahun 1990an, era booming mineral juga telah berakhir. Bahkan beberapa komoditas lainnya merosot tajam. Karena itu kita harus berubah. Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Kita harus menyelesaikan semua masalah secara cepat. Itu artinya kita juga harus membuat garis tegas. Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjag sumber daya alam kita. Kita harus berani melawan pencurian sumber daya laut kita. Kita berani menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan kita. Kita harus berani menjaga setiap jengkal bumi pertiwi untuk kemakmuran rakyat kita. Kita berani bubarkan Petral. Kita berani alihkan subsidi untuk hal-hal yang produktif. Kita tegas menyatakan perang pada bandar-bandar Narkoba yang merusak masa depan generasi muda kita. Kita harus tegas menghadapi infiltrasi ideologi seperti ekstrimisme, radikalisme, terorisme yang merusak sendi-sendi negara kita.

Tidak ada halangan bagi kita untuk menarik garis tegas karena kita berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berani

bersikap tegas karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan jiwa kita semua.

Pancasila adalah pemersatu kita semua, yang harus kita hayati, yang harus kita amalkan, yang harus menjadi ideologi yang bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Pemerintah 10 mengambil inisiatif membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP yang mendapatkan tugas melakukan pembinaan ideologi kepada seluruh elemen rakyat, termasuk generasi muda, penerus masa depan bangsa. Saudara-saudaraku di Sabang, Salamualaikum, Kruen Semangat! Untuk memenuhi janji kemerdekaan, mengharuskan kita bekerja lebih fokus.

Pada tahun pertama Kabinet Kerja, Pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris. Pada tahun kedua, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Kita juga melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket Kebijakan Ekonomi. Pada tahun ketiga, Pemerintah bergerak lebih maju lagi, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata. Kita ingin para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama. Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita

segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia. Kesanalah kita bergerak. Dalam tiga tahun terakhir ini, Pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017. Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414. Angka inflasi kita juga terkendali di tingkat 2,6 persen dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017, yaitu menjelang bulan puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39 persen. Pertumbuhan ekonomi juga terus kita jaga agar berkualitas dan berkeadilan. Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5 persen per tahun pada periode 2014-2016, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pembangunan yang kita jalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan. Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia.

Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan kehadiran Negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain dan Motamasin-NTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk-Kalimantan Barat, dan NangaBadau-Kalimantan Barat.

PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang kita harapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih

merata di seluruh pelosok negeri. Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa, Pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga. Pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemandirian jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian. Komitmen pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa, yang pada tahun 2017 ini besarnya Rp 60 triliun. Dengan dana desa ini, Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa. Dalam mendukung pemerataan, Pemerintah juga mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada bulan Maret tahun 2017. Dalam sidang yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada warga Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, setelah 72 tahun merdeka, sekarang akhirnya bisa menikmati layanan listrik. Selamat juga untuk warga desa-desa lain di seluruh Tanah Air, yang tahun 2017 ini bisa menikmati layanan listrik. Keinginan untuk melakukan pemerataan yang berkeadilan bukanlah sekedar slogan, kita harus betul betul wujudkan secara konkret. Bertahun-tahun Saudara-saudara kita di Tanah Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal, harganya berpuluh-puluh kali lipat dengan harga yang dibeli oleh saudara kita di pulau Jawa atau Sumatera. Hal ini tidak boleh terjadi di Negeri Pancasila. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, sehingga Saudara-saudara kita di Tanah Papua menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan daerah lain di Indonesia.

Saudara-saudaraku di Merauke, Namek-Namuk, Izakod Bekai Izakod Kai, Satu Hati Satu Tujuan. Tujuh puluh dua tahun kita merdeka, ketika negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, di negara kita tercinta, urusan sertifikasi lahan untuk rakyat belum tuntas-tuntas juga. Akibatnya, terjadi sengketa lahan baik antarwarga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan

pemerintah. Karena itu, melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250 ribu bidang. Pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat dan sudah memberikan 707 ribu hektar kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif. Selain itu, juga sedang 15 dijalankan Program Perhutanan Sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka. Pemerintah juga terus melanjutkan program-program kerakyatan yang sudah dijalankan sejak tahun pertama Kabinet Kerja, utamanya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Perlindungan Nelayan, Program Percepatan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Agar bisa menjangkau 40 persen lapisan terbawah Pemerintah melakukan reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran. Pemerintah secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial serta melakukan pengalihan Beras Sejahtera (Rastra) secara bertahap menjadi bantuan pangan nontunai. Selain itu, keberpihakan pada 40 persen lapisan terbawah juga dilakukan melalui penguatan program-program perlindungan sosial dan perluasan cakupan penerima manfaat. Untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah juga terus berusaha menekan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sekarang ini suku bunga KUR bisadi angka 9 persen. Kita berharap Rp94,4 triliun KUR yang sudah disalurkan di tahun 2016 dapat ikut mengangkat kesejahteraan sektor UMKM. Dengan akses permodalan yang lebih mudah itu, maka kita berharap bisa menggerakkan ekonomi rakyat terutama kalangan pedagang-pedagang kecil. Selain mempermudah akses permodalan, kita juga melakukan revitalisasi pasar sehingga para pedagang bisa berdagang dengannyaman dan tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar modern.

Saudara-saudaraku di Miangas, Tabea, Sansiote Sang Patepate Salam, Kebersamaan dalam Persatuan. Kita harus ingat bahwa membangun Indonesia adalah membangun manusia Indonesia. Alhamdulillah, kerja bersama kita selama ini dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia telah menuai hasil yang menggembirakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bergerak naik dari negara kategori medium high development menjadi negara dalam kategori high human development, dengan angka IPM naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 tahun 2016.

Kenaikan IPM tersebut tidak terlepas dari kerja bersama kita dalam meningkatkan cakupan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil.

Pembangunan sumber daya manusia akan terus berlanjut. Pemerintah bukan hanya konsentrasi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis, menekan angka stunting, tapi juga menyiapkan generasi muda yang berkualitas, yang terampil dan siap untuk berkompetisi. Untuk itu, Pemerintah menginisiasi peningkatan kompetensi tenaga kerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Kita terus memperbanyak dan memperkuat pendidikan SMK dan Politeknik yang harus memiliki keterkaitan dengan dunia industri. Semuanya dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan tangguh. Saudara-saudaraku di Rote, Ita Esa, Kita adalah Satu Kesatuan Pembangunan manusia serta infrastruktur sosial berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan infrastruktur fisik. Agar anak-anak kita bisa belajar dengan baik maka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan. Seiring dengan penyiapan sumberdaya manusia Indonesia, Pemerintah juga membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, kawasan-kawasan industri baru di Luar Jawa seperti Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatera Utara dan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah. Pengembangan kawasan industri itu didukung oleh pembangunan

infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah Nusantara. Kita juga ingin seluruh wilayah Indonesia terhubung baik melalui udara, laut maupun darat. Untuk itu, kita membangun bandara perintis, pelabuhan, jalan paralel perbatasan di Kawasan Perbatasan Wilayah Kalimantan Timur, jalan lintas perbatasan di Papua, dan jalan sabuk perbatasan di Provinsi NTT. Perekonomian daerah, terutama di kawasan pinggiran tidak akan bisa bergerak dengan cepat apabila tidak ada tenaga listrik dan prasarana telekomunikasi. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pembangunan energi listrik di 31 lokasi prioritas dan meneruskan pembangunan berbagai Base Transceiver Station (BTS) sehingga kecamatan-kecamatan di perbatasan dan garis perbatasan NKRI dapat mengakses telepon dan informasi. Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Kita akan menjadi bangsa maju yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia apabila kita memiliki daya saing. Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ini musuh kita bersama. Karena itu, di depan Sidang Bersama yang terhormat ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi. Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK. Selain memerangi korupsi yang menggerogoti APBN, menggerogoti uang rakyat, kita juga terus menguatkan sistem dan basis data perpajakan nasional. Untuk itu Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Sidang Anggota Dewan yang terhormat, yang telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Kita optimis bahwa dengan Perppu tersebut, APBN Indonesia akan semakin kokoh karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, Indonesia juga semakin siap menyambut era keterbukaan informasi internasional yang memberlakukan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI). Selanjutnya, dalam menatap daya saing Indonesia ke depan,

kita harus mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat dan serba digital. Kita harus terus meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi Non-Tunai. Pemerintah juga memangkas berbagai regulasi dan pita birokrasi yang panjang yang selama ini telah membelenggu ekonomi Indonesia, terutama melalui 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 2015. Hasil dari berbagai Paket Kebijakan Ekonomi itu terlihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia. Dalam peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), posisi Indonesia meningkat dari peringkat 106 pada tahun 2016, menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Begitu pula Indonesia mendapat peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu Standard and Poor's Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody's. Bahkan di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif. Anggota Dewan yang terhormat, Hadirin sekalian yang saya muliakan, Salah satu janji kemerdekaan seperti tercantum dalam pembukaan konstitusi adalah kita ikut serta dalam upaya memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal itu mengharuskan kita semua untuk menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Dalam diplomasi internasional, salah satu keaktifan dan kepemimpinan Indonesia ditunjukkan dengan mendorong Myanmar untuk menyelesaikan konflik di Rakhine state melalui pembangunan yang lebih inklusif, menghormati HAM, dan melindungi semua komunitas. Indonesia juga telah menampung 1.806 migran akibat konflik tersebut, mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan membangun sekolah-sekolah di Myanmar. Kita juga memberikan dukungan penuh pada kemerdekaan Palestina. Kita telah membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah, Palestina. Kita juga terus mendorong ASEAN dan PBB untuk mendukung kemerdekaan

Palestina. Indonesia juga mengecam keras pembatasan beribadah di Masjid Al-Aqsa bulan Juli 2017. Diplomasi Indonesia bergerak membela rakyat Palestina antara lain dengan mengusulkan proteksi internasional di Kompleks Al-Aqsa. Sedangkan dalam diplomasi ekonomi, mesin diplomasi kita juga terus bergerak menggarap pasar-pasar non-tradisional di Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Selama setahun ini, PT INKA berhasil mengeksport 150 gerbong kereta api ke Bangladesh, PT Dirgantara Indonesia mengeksport pesawat CN235 ke Senegal dan Thailand. Perlindungan warga negara kita diluar negeri juga menjadi komitmen kita bersama. Selain kita melakukan langkah-langkah perlindungan dan pendampingan pada pekerja migran, kita juga telah berhasil membebaskan sebagian besar WNI yang diculik kelompok teroris di Mindanao dan mengevakuasi WNI yang terjebak dalam konflik ISIS Marawi. Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Di tengah gelombang globalisasi yang berubah cepat dan ekstrem, kemandirian bangsa Indonesia adalah pilar yang sangat penting guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan sosial. Pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dengan meningkatkan produksi bahan pangan strategis, utamanya padi, jagung, daging sapi, cabai, dan bawang merah. Pemerintah juga terus memperkuat kemandirian bangsa melalui inovasi teknologi dan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan serta mendorong kenaikan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik. Segenap rakyat Indonesia yang saya kasihi, Anggota Dewan yang saya hormati, Dalam kesempatan ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingin menegaskan pentingnya demokrasi serta stabilitas politik dan keamanan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui demokrasi, kita menjaga kedaulatan rakyat dan kerukunan dalam keragaman. Kita patut bersyukur bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2017 di 101 daerah berjalan dengan amandan damai. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas gotong royong semua pihak, dari lembaga penyelenggara pemilu tingkat pusat dan daerah, aparat TNI dan POLRI, segenap partai politik,

termasuk kepada semua calon kepala daerah dan calon wakilnya. Paling utama, Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang sudah memberikan suaranya, sebagai wujud kegembiraan berpolitik dan kematangan berdemokrasi. Saya mengajak kita semua untuk terus kerja bersama merawat kematangan demokrasi Indonesia, terutama di Pilkada Serentak tahun 2018. Sebagai bagian penting dalam menjaga momentum kegembiraan demokrasi rakyat itu, Pemerintah terus memperhatikan stabilitas keamanan, serta mendorong peningkatan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan TNI dan Polri.

Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia berterima kasih pada TNI karena selalu setia pada NKRI, selalu siaga menjaga kedaulatan bangsa dan negara, termasuk dari infiltrasi gerakan terorisme global. Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia juga berterima kasih pada Polri karena selalu menjaga rasa aman masyarakat, termasuk keberhasilan Polri, BNN, dan Ditjen Bea Cukai dalam membongkar penyelundupan 1 ton sabu. Ke depan, TNI dan Polri harus terus kita perkuat sebab tantangan ke depan sangat kompleks dan berubah sangat cepat. Tantangan pertahanan dan keamanan yang kita hadapi tidak lagi dalam paradigma Jawa Sentris, melainkan Indonesia Sentris. Karena itu, gelar pasukan TNI, serta strategi pertahanan kita, harus bisa menjaga setiap jengkal tanah, setiap ombak lautan, dan setiap kaki langit Tanah Air Indonesia. Sedangkan jenis ancaman yang kita hadapi sekarang bukan lagi hanya serbuan dari negara lain tetapi ancaman baru berupa gerakan ekstrimisme, radikalisme, terorisme, perdagangan manusia, kejahatan narkoba, penyelundupan senjata, dan kejahatan siber.

Karena itu, saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk terpanggil menjalankan tugas dan tanggung jawab kebangsaan kita untuk ikut serta bela negara. Di manapun kita berada, apapun pendidikan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semuanya hak, semua punya kewajiban, semua punya kesempatan yang sama untuk bela negara. Hadirin yang saya muliakan,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Sebagai penutup Pidato Kenegaraan di depan Sidang Terhormat ini, saya mengajak kita semua yang diberi amanat oleh rakyat, yang sedang memanggul mandat dari rakyat, agar tetap teguh menjadikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagai haluan kerja kita, sebagai tujuan kerja bersama kita, demi terwujudnya Indonesia Raya. Maka dari Sabang, dari Merauke, dari Miangas, dari Rote, mari kita bersama-sama berseru: Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

**PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENGANTAR/ KETERANGAN
PEMERINTAH ATAS RUU TENTANG APBN TAHUN 2018
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

RABU, 16 AGUSTUS 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang, Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya.

Salam Kebajikan,

Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak H. Jusuf Kalla;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung.

Hadirin yang saya hormati, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, siang ini kita menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya. Penyampaian keterangan Pemerintah atas

tunaikan, yang harus kita tuntaskan. Momen yang mengingatkan kita semua bahwa Proklamasi Kemerdekaan adalah pintu gerbang untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Momen yang mengingatkan kita semua bahwa janji-janji kemerdekaan hanya bisa kita capai apabila kita kerja bersama, kerja bersama. Penyusunan RUU APBN tahun 2018 ini merupakan wujud konkret dari kerja bersama antara Pemerintah, DPR, dan DPD. Pada proses pembicaraan pendahuluan dengan DPR dan DPD beberapa waktu yang lalu, Pemerintah telah mendapatkan masukan yang konstruktif dari anggota Dewan yang terhormat. Dengan masukan-masukan itu, Pemerintah dapat menyusun RAPBN Tahun 2018 dan bisa menyampaikan pada Sidang Paripurna Dewan pada hari ini. Insya Allah, kerja bersama antara Pemerintah dan Dewan tersebut akan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian sesuai dengan cita-cita luhur para pendahulu kita. Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, RAPBN tahun 2018 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, kita telah menyusun fondasi dengan mereformasi arah pembangunannasional menjadi lebih produktif, merata, dan berkeadilan. Dengan demikian, RAPBN tahun 2018 harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan ekonomi, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan membuka lapangan pekerjaan. Di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, penyusunan RAPBN tahun 2018 harus tetap dilakukan secara realistis, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan, untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan dunia usaha. Pada tahun 2015, kita telah meletakkan fondasi pembangunan nasional melalui transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif, kita ubah menjadi produktif. Belanja subsidi energi yang kurang tepatsasaran, kita realokasi menjadi berbagai program prioritas untuk masyarakat termasuk di bidang infrastruktur. Kita juga mulai mengalokasikan Dana Desa untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di pelosok Tanah Air yang selama ini belum tersentuh pembangunan. Memasuki tahun 2016, Pemerintah bergerak lebih cepat dengan mencanangkan tahun 2016 sebagai Tahun

Pemerintah bertekad menjadikan Pemerataan Ekonomi sebagai fokus utama pembangunan. Kebijakan itu utamanya mencakup: Pertama, redistribusi aset, melalui pemberian hak pengelolaan tanah terlantar kepada masyarakat sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih produktif, serta legalisasi tanah melalui percepatan sertifikasi tanah-tanah milik rakyat. Kedua, penguatan akses rakyat untuk mendapatkan modal, melalui Kredit Usaha Rakyat yang menjangkau semakin banyak masyarakat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya. Ketiga, peningkatan keterampilan masyarakat, melalui program pendidikan kejuruan, serta pendidikan dan pelatihan vokasi secara masif. Sidang Dewan yang saya muliakan, Alhamdulillah, berkat kerja keras kita bersama dan atas perkenan Allah SWT, pembangunan ekonomi nasional telah menunjukkan capaian yang cukup menjanjikan. Di tengah perlambatan pertumbuhan perekonomian global, pelemahan harga komoditas global, dan kondisi geopolitik yang belum sepenuhnya kondusif, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun pada periode 2014-2016, dan naik menjadi 5,01 persen di semester I tahun 2017, didorong oleh perbaikan kinerja ekspor dan peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang tetap dijaga naik disertai berbagai perbaikan pengelolaan anggaran, terus mendorong kepercayaan investor kepada kita. Bank Dunia merilis Indonesia sebagai salah satu negara teratas dalam Top Improvers bagi perbaikan kemudahan berusaha dan menaikkan peringkat Indonesia dari posisi 106 ke posisi 91 dalam laporan Ease of Doing Business tahun 2017. Pada bulan Mei 2017, lembaga pemeringkat Standard & Poors menaikkan peringkat Surat Utang Negara Indonesia menjadi peringkat layak investasi (investment grade). Sebelumnya, Fitch dan Moodys juga menaikkan outlook untuk peringkat layak investasi Surat Utang Negara Indonesia, dari stabil menjadi positif, seiring dengan stabilitas makro ekonomi dan perbaikan daya tahan perekonomian nasional. Dengan pengakuan internasional tersebut, untuk pertama kalinya Indonesia mendapatkan peringkat layak investasi dari seluruh lembaga pemeringkat kredit utama dunia sejak pasca krisis keuangan Asia tahun 1997. Dengan dukungan perbaikan infrastruktur dan logistik pasokan barang kebutuhan masyarakat, serta kerjasama yang solid antara Pemerintah dengan Bank Indonesia, tingkat inflasi dapat dikendalikan di 3,35 persen pada tahun 2015 dan 3,02 persen pada tahun 2016; sehingga daya beli masyarakat dapat dipertahankan. Pengendalian inflasi masih terus dilanjutkan pada tahun 2017.

penurunan. Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin terhitung 28,59 juta orang dan pada Maret 2017 turun menjadi 27,77 juta orang. Dengan tantangan tersebut, Pemerintah akan terus berupaya maksimal untuk mengakselerasi penurunan jumlah penduduk miskin melalui berbagai inovasi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial. Ketimpangan antara masyarakat kaya dan miskin juga menunjukkan penurunan. Ini terlihat dari indeks Rasio Gini dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Selain itu, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 5,33 persen pada Februari 2017. Langkah perbaikan proses penganggaran juga dilakukan secara lebih komprehensif dari berbagai perspektif. Di bidang Pendapatan Negara, pada Juli 2016 hingga Maret 2017, Pemerintah melaksanakan program pengampunan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, memperluas basis data perpajakan, dan sekaligus sebagai persiapan Indonesia memasuki era keterbukaan informasi global dengan pemberlakuan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information). Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan DPR yang telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI). Dengan persetujuan Perppu AEOI maka Indonesia telah memiliki kelengkapan legislasi sama seperti lebih dari 100 negara peserta AEOI. Indonesia akan mendapatkan manfaat pertukaran informasi perpajakan antar negara yang sangat berguna dalam meningkatkan upaya ekstensifikasi penerimaan perpajakan kita. Pemerintah juga mengucapkan terima kasih atas kesadaran masyarakat mengikuti program tax amnesty yang mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Sampai dengan akhir pelaksanaan program, tax amnesty berhasil diikuti oleh 973,4 ribu wajib pajak dengan total penerimaan uang tebusan mencapai Rp115,9 triliun. Berdasarkan pengungkapan harta, program tax amnesty Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia dengan hasil capaian sebesar Rp4.884,2 triliun, yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp3.700,8 triliun, deklarasi harta luar negeri sebesar Rp1.036,7 triliun, dan harta repatriasi aset sebesar Rp146,7 triliun. Selanjutnya, Sadar Pajak ini harus diikuti dengan kewajiban membayar pajak dengan baik pada masa mendatang. Kesadaran warga negara dalam membayar pajak akan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia

pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi, guna menyerap tenaga kerja serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Beberapa target output di bidang infrastruktur telah berhasil kita capai pada periode 2015-2016. Pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional lebih kurang sepanjang 7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan 4 bandara baru, serta pembangunan jalur kereta api baru sepanjang 199,6 kilometer spoor diharapkan akan membuka akses ekonomi yang lebih luas. Selain itu, Pemerintah juga fokus dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas Rumah Susun, Rumah Khusus, dan Rumah Swadaya sebanyak 210,5 ribu unit. Selain itu, sejak tahun 2015, Pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran serta melakukan penguatan program-program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bantuan tunai bersyarat Program Keluarga Harapan (PKH) yang semula 3,5 juta keluarga pada tahun 2015 menjadi 6 juta keluarga pada tahun 2017. Pemerintah juga secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial, dengan melakukan pengalihan bertahap Subsidi Pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat pada 44 Kota. Untuk mempercepat pembangunan di Daerah, melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, beberapa target pembangunan telah berhasil kita tingkatkan. Dengan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah melakukan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur dasar, seperti akses terhadap air minum meningkat sebanyak 386,7 ribu sambungan rumah sampai dengan akhir tahun 2016. Selain itu, Pemerintah juga mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di daerah dengan peningkatan presentase kemandirian jalan provinsi menjadi 71,8 persen, jalan kabupaten/kota menjadi 61,2 persen dan irigasi pertanian seluas 895 ribu hektar. Komitmen Pemerintah untuk membangun daerah dari unit pemerintahan terkecil ditunjukkan dengan capaian-capaian alokasi Dana Desa. Sejak dialokasikan pada tahun 2015, Dana Desa telah menghasilkan lebih dari 89,8 ribu kilometer jalan desa, 746,4 ribu meter jembatan, akses air bersih untuk 22,1 ribu rumah tangga, 1,7 ribu unit tambatan perahu, 14,9 ribu unit PAUD, 4,1 ribu unit Polindes, 19,5 ribu unit sumur, 3 ribu unit pasar desa, 108 ribu unit drainase dan irigasi, serta 9,9 ribu unit Posyandu, dan 941 unit embung Sementara itu, terkait Pembangunan

Pemerintah tetap melaksanakannya dengan hati-hati serta menjaga kesinambungan fiskal ke depan. Peningkatan pembiayaan utang diarahkan kepada sektor-sektor produktif di masa depan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pembangunan daerah. Pemerintah akan terus menjaga pengelolaan utang secara hati-hati dan bijaksana untuk menghasilkan dampak positif pembangunan yang maksimal yang manfaatnya dapat dinikmati masyarakat luas. Meski dengan perluasan pembangunan yang ekspansif selama periode 2015-2017, rasio utang dan defisit terhadap PDB dijaga tetap terkendali; rasio utang terhadap PDB tetap berada di bawah 30 persen dan defisit APBN di bawah 3 persen. Pemerintah juga akan terus mengurangi defisit primer sehingga kesehatan dan keberlanjutan fiskal selalu dapat terjaga. Dengan defisit yang relatif kecil dibanding negara-negara anggota G-20 maupun emerging countries lainnya; dan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif lebih tinggi, itu menunjukkan bahwa tambahan utang Indonesia telah menghasilkan peningkatan skala dan produktivitas ekonomi nasional. Saudara-saudara se-Bangsa se-Tanah Air, RAPBN tahun 2018 kita susun dengan berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama. Pertama, mendorong optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara. Kedua, melakukan penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran, sinergi antara program perlindungan sosial, menjaga dan refocusing anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik. Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, dan pengembangan creative financing, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, maka tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan". Hadirin yang saya muliakan, Dengan memperhatikan seluruh dinamika yang ada dan tantangan yang dihadapi, maka Pemerintah merencanakan indikator ekonomi makro tahun 2018 sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2018 sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi

2018, pembangunan ekonomi akan diarahkan untuk menumbuhkan ekonomi kawasan Maluku, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara melalui peningkatan keterkaitannya dengan Pulau Jawa dan Sumatera yang selama ini menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur, baik konektivitas maupun ketersediaan energi, merupakan kunci dari upaya pemerataan ekonomi ini. Selain itu, pengembangan daerah perbatasan juga menjadi prioritas Pemerintah, agar menjadi pintu gerbang transaksi perdagangan internasional, sehingga tidak hanya mampu meningkatkan perekonomian di daerah perbatasan, namun juga perekonomian nasional secara keseluruhan. Kedua, inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga di tingkat 3,5 persen, didukung oleh perbaikan kapasitas produksi nasional, stabilisasi harga, serta harga komoditas global yang masih relatif rendah. Walaupun demikian, dampak cuaca terhadap harga komoditas pangan menjadi risiko yang perlu dipertimbangkan, karena cuaca merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi. Penguatan koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil tentunya akan terus ditempuh dan ditingkatkan untuk lebih mendukung terjaminnya stabilitas harga di dalam negeri. Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membangun upaya penguatan di sektor keuangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kerangka pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat memengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Keempat, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 5,3 persen. Antisipasi pasar dalam menghadapi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat serta kondisi inflasi domestik yang terkendali berkontribusi dalam upaya pengendalian tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD 48 per barel. Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang memengaruhi kenaikan harga minyak pada tahun 2018. Keenam, volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2018 diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setar minyak per hari. Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2018.

yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dengan fokus pada keadilan sosial. Adapun kebijakan strategis dalam RAPBN tahun 2018 sebagai berikut: Belanja Negara pada tahun 2018 yang direncanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun akan diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat; yang akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Upaya peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerimaan manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang. Selain itu, dalam rangka penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, Pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastha menjadi bantuan pangan non tunai dan juga akan diperluas penerimaan manfaatnya. Untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, Pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik. Dalam rangka peningkatan akses pendidikan, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan pemberian Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401.500 siswa, serta alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 262.100 sekolah umum dan madrasah di seluruh penjuru Tanah Air. Masih dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kurang gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada bayi atau stunting. Hal ini mengingat seribu hari pertama kehidupan akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, terkait dengan kemampuan emosional, sosial dan fisik, serta kesiapan untuk belajar, berinovasi dan berkompetisi. Program ini akan sangat penting untuk memperbaiki kualitas anak-anak Indonesia ke depan sebagai investasi kita di sumber daya manusia Indonesia. Para hadirin sekalian yang kami muliakan, Untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antar daerah, Pemerintah akan melaksanakan program pembangunan jalan baru sepanjang 856 kilometer dan pembangunan irigasi sepanjang 781 kilometer. Selain itu, beberapa program kegiatan Pemerintah

dan pembangunan rumah susun sebanyak 7.062 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk bekerja bersama, baik BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, maupun swasta dalam pengembangan pembiayaan kreatif seperti melalui skema KPBU atau non KPBU guna bersama-sama mendanai pembangunan infrastruktur. Dengan alokasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 761,1 triliun, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terus dilakukan untuk mendorong efektivitas pendanaan pembangunan. Selain untuk mendukung kegiatan pemerintah di Daerah, anggaran tersebut akan dipertajam penggunaannya untuk mendanai program pembangunan yang menjadi prioritas nasional, utamanya melalui DAK dan Dana Desa. Anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa utamanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Melalui DAK Fisik akan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik, afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Dana Desa akan lebih diperkuat pemanfaatannya agar dapat memperluas pembangunan di desa, baik sarana maupun prasarana, dengan berbasis kinerja. Penguatan pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah juga semakin ditingkatkan melalui bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada sekitar 200 kabupaten/kota sepanjang 2018. Dengan demikian, kesetaraan pemahaman dan keterampilan para pengelola keuangan daerah akan menciptakan harmonisasi keuangan pusat dan daerah. Pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, memerlukan dukungan penuh dari semua pihak, sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan dengan efisien dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Korupsi dan pemborosan uang rakyat tidak boleh ditoleransi. Sidang Dewan yang saya muliakan, Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp 1.878,4 triliun. Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan, serta peningkatan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan. Namun demikian, Pemerintah akan tetap mendukung peningkatan dunia usaha melalui pemberian insentif perpajakan. Pada tingkat

Negara Bukan Pajak juga akan didorong dengan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam, laba dari badan usaha milik negara, serta sumber-sumber ekonomi lainnya dari PNBPN. Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, Dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun 2018 dan strategi yang mendukungnya, maka Pendapatan Negara dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 1.878,4 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 267,9 triliun. Pemerintah akan berupaya secara maksimal untuk dapat mencapai target penerimaan tersebut dengan berbagai langkah perbaikan serta memanfaatkan semua potensi ekonomi nasional, namun dengan tetap menjaga iklim investasi dan stabilitas dunia usaha. Sementara itu, Belanja Negara dalam RAPBN 2018 direncanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.443,3 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 761,1 triliun. Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah efisiensi, penajaman kualitas belanja, serta pencapaian sasaran pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi ketimpangan, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dengan rencana Pendapatan Negara dan Belanja Negara dalam tahun 2018 tersebut, defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 325,9 triliun atau setara dengan 2,19 persen dari PDB. Sasaran defisit anggaran tahun 2018 tersebut lebih rendah dari outlook-nya di tahun 2017 yang sebesar Rp 362,9 triliun atau 2,67 persen dari PDB. Tingkat keseimbangan primer di tahun 2018 direncanakan juga mengalami penurunan, dari perkiraan sebesar minus Rp 144,3 triliun dalam tahun 2017 menjadi minus Rp 78,4 triliun. Untuk membiayai defisit anggaran dalam tahun 2018 tersebut, Pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam bentuk pinjaman/utang, yang akan dikelola dengan berhati-hati dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pengelolaan internasional. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang produktif mendukung program pembangunan nasional, di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, rasio utang terhadap PDB akan dijaga di bawah tingkat yang diatur dalam keuangan negara, dikelola secara transparan dan akuntabel, serta meminimalkan risikonya pada stabilitas perekonomian di masa sekarang dan akan datang. Ketua, para Wakil Ketua,

Anggaran 2018 dengan DPR dan DPD RI. Saya mengharapkan dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota DPR serta DPD untuk dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut tepat waktu, guna dapat dijalankan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di tahun 2018.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkahi langkah kita semuanya, untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mandiri, berdaulat, berkepribadian, serta adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia Dirgahayu Indonesia! Dirgahayu Pancasila! Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

Selamat sore.